

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

##### 1. Ontologi, epistemologi dan aksiologi

Dunia (budaya), realitas, adalah kemungkinan-kemungkinan. Tidak ada 'hukum besi', misalnya hukum evolusi Darwinian, yang mengatur perkembangan atau perubahan realitas. Sejarah belum berakhir (berbeda dengan neoliberalis: sejarah sudah berakhir); sejarah berakhir ketika manusia berakhir kehidupannya. Realitas atau sejarah diciptakan manusia bersama manusia-manusia lainnya; dan kemudian sejarah mengkondisikan, bukan men-determinasi, kehidupan manusia. Realitas adalah wujud yang belum selesai.

Manusia yang berada bersama dunia, adalah *unfinished beings, inconclusive beings*. Secara demikian *ontological vocation*-nya adalah menjadi manusia, subjek. Sebagai subjek, ia tidak boleh menjadi objek. Di tengah dunia, juga di tengah alam semesta, ia harus mentransendensi diri, bukan tenggelam di tengah dunia. Dengan demikian manusia jelas adanya sebagai makhluk bebas.

Kebebasan manusia dibatasi oleh kebebasan orang-orang lainnya. Batas kebebasan adalah humanisasi. Kebebasan siapa pun harus menghargai dan patuh pada humanisasi yang berlaku bagi siapapun di muka bumi. Karena *ontological vocation*-nya yang demikian, manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas nasibnya, atas sejarahnya, atas masa depannya. Perjalanan sejarah bukan ditentukan Tuhan. Tuhan hanya menciptakan alam (hewan dan tumbuhan) dan manusia.

*Ontological vocation* manusia, sekalipun ia makhluk terbatas tetapi ia suatu subjek, adalah menciptakan atau menciptakan-ulang (*to create, to re-create*) dunianya. Ini dilakukannya secara transendental, melalui penciptaan makna, melalui eksistensi, bukan sekedar ekstensi dari *life-support*-nya sebagaimana yang dilakukan hewan. Perilaku hewan hampir tidak ada jarak dengan *life-support*-nya. Manusia menciptakan dunia (budaya) yang terpisah dari dirinya. Karena itu, dapat menjadi beraneka-ragam antarkelompok sosial.

Freire menegaskan peranan manusia atau subjek adalah *to create* dan *to re-create* dunia, dengan cara problematisasi, intervensi kritis, iluminasi, transendensi, transformasi, bereksistensi, *conscientization*. Berbeda dengan hewan, tugasnya menerima apa yang sudah disediakan, beradaptasi terhadap lingkungannya.

Dunia, budaya, setelah diciptakan, memiliki perilaku dan kuasa tersendiri, dapat menenggelamkan subjek di dalamnya hingga terjadi apa yang disebut objektivikasi atau massifikasi. Dunia dengan temporalitasnya, memuat tema-tema zaman yang pada salah satu sisinya dapat menjadi *limit-situations*, situasi pembatas, mendominasi kesadaran atau menenggelamkannya. Contoh-contoh tema zaman dewasa ini adalah globalisasi, pasar bebas, neoliberalisme, Westernisasi; atau apapun yang mendominasi kesadaran banyak orang, hingga kesadaran tenggelam. Terhadap *limit-situations*, manusia harus mengumumkan dirinya sebagai subjek dengan melakukan *limit-acts*, tindakan-tindakan mengatasi atau keluar dari *limit-situations*. Inilah yang disebut *conscientization*, penyadaran diri, afirmasi-diri, penegakan posisi diri sebagai subjek bersama dunia dan bersama subjek-subjek lainnya; atau humanisasi.

Tuhan maha agung, Penguasa tertinggi dengan ‘kelapangan dada’ yang tak terhingga menganugrahi manusia dengan kemampuan menciptakan dunia dan memeliharanya. Tuhan yang menjadikan manusia sebagai subjek yang bebas dan bertanggung jawab penuh untuk penciptaan dunia dan pelanjutannya tanpa intervensi Tuhan. Inilah Tuhan seorang deis, maha bijak dan menyediakan hari akhir.

Nilai-nilai yang tertinggi adalah humanisasi. Humanisasi bersifat universal, berlaku bagi semua orang, tidak bisa bersifat eksklusif bagi segelintir orang; karena itu penindasan bukan hanya dehumanisasi untuk si tertindas tetapi juga untuk si penindas. Humanisasi mempersyaratkan kecintaan kepada kehidupan, kepada semua orang (*biophily* bukan *necrophily*); solidaritas dengan sesama manusia, kepercayaan kepada manusia lain, rendah hati, keterbukaan.

Pengetahuan adalah sebuah bagian dari dunia, diciptakan manusia. Pengetahuan tidak netral, karena tidak berada dalam *vacuum*, berada dalam masyarakat dengan nilai-nilai tertentu. Di dalamnya terkandung aspirasi, cita-cita

masyarakatnya, mengekspresikan kemanfaatannya sebagaimana dipersepsi oleh masyarakatnya. Pengetahuan dewasa ini dominan produk masyarakat maju, masyarakat kapitalis. Pengetahuan yang dihargai tinggi yang tercakup dalam Iptek dan menjadi isi-isi pendidikan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat industrial tersebut.

Pengetahuan sebagai sebuah bagian dari dunia bersifat sama sebagai makhluk yang *unfinished* yang diproduksi oleh manusia yang *unfinished* juga; karena itu pengetahuan tidak absolut melainkan berkembang.

Tradisi idealisme dan rasionalisme Barat selama ini menumbuhkan kepercayaan bahwa pengetahuan diperoleh dengan berpikir abstrak. Hal ini didukung oleh keberhasilan ilmu-ilmu kealaman dengan abstraksi simbolis-matematisnya atas hasil-hasil observasinya. Kemudian hal ini mendominasi ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Untuk pedagogi, Freire menempuh jalan lain, yaitu praksis. Buku saja tidak cukup untuk membangun sebuah pedagogi. Pedagogi harus dibangun melalui praktik-praktik dan refleksi-refleksi atas praktik-praktik ini. Freire bahkan memadukannya dengan dialog sebagai sebuah filsafat dan praktik: pedagogi harus dibangun bersama si terdidik (kaum tertndas), bukan dibangun oleh si pendidik untuk si terdidik. Freire menolak preskripsi sebagai praktik mendidik.

## 2. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan adalah humanisasi. Humanisasi merupakan titik tolak, arah tindakan dan titik tuju pendidikan. Nilai-nilai humanisasi bersifat *universal*, tetapi *on going*. Humanisasi sebagai titik tolak pendidikan karena harus diasumsikan sejak pendidikan dimulai. Memulainya tanpa manusia, seperti dalam kasus pendidikan sebagai transfer Iptek, pelatihan, mmorisasi, dan indoktrinasi, adalah bukan pendidikan. Manusia membangun sejarah untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaannya tetapi pada titik tertentu sejarah yang dibangun menjadi mendominasi manusia. Karena itu, humanisasi selalu diperjuangkan, ditegakkan dan dikritisi. Humanisasi sebagai arah tindakan merupakan basis nilai untuk *being* bangkit dari *nothingness* kemudian menuju *being better*. Humanisasi

sebagai titik tuju pendidikan adalah penciptaan/transformasi sejarah peradaban kemanusiaan yang lebih baik merupakan tujuan pendidikan.

### 3. Isi Pendidikan

Isi pendidikan adalah dialektika antara teks dan konteks. Teks adalah Iptek, sedangkan konteks adalah lingkungan sosial-budaya, juga yang bersumber dari tema-tema zaman (globalisasi, demokratisasi, neoliberalisme, pasar bebas). Kesadaran akan konteks mesti berkaitan dengan amanah diri: posisi diri di tengah konteks. Kompetensi yang selayaknya dikembangkan adalah kesadaran kritis dan transformatif terhadap tema-tema zaman yang mendominasi dengan cara mengembangkan berpikir kritis, refleksi otentik, pengetahuan yang hidup/iluminatif, dan menangkap *reason for being*. Dengan demikian isi pendidikan melampaui dari sekedar kemampuan kognitif, yaitu metakognitif.

### 4. Proses Pendidikan

Proses pendidikan melibatkan *conscientization*, dalam rangka menamai dunia, penciptaan dunia yang lebih baik, dengan mengintervensi kritis dunia, melalui perhubungan dialogis antara terdidik dan pendidik. Kesadaran terdidik harus berkembang dari kesadaran naif ke kesadaran kritis, dan kesadaran transformatif/politis dengan cara problematisasi isipendidikan/dunia. Pendekatan pembelajarannya adalah pendidikan hadap-masalah, pendidikan tematik, pendidikan kritis, pembebasan, praksis dan transformatif/radikal. Perhubungan dialogis ditandai dengan syarat-syarat perhubungan yaitu dengan adanya cinta, kerendahan hati, kritis, kepercayaan yang dalam, dan optimistik. Peranan pendidik adalah belajar, mempelajari objek bersama terdidik, menghargai manusia, mentransformasi sosial, keteladanan, mengajar terpadu dengan refleksinya, mengajar menciptakan kemungkinan belajar, mengajar melalui ceramah dan diskusi, mengajar dengan kata yang benar (praksis) dan mengajarberpikir kritis.

### 5. Relevansi Pikiran Fundamental Freire untuk Pendidikan di Indonesia

Relevansi pikiran fundamental Freire untuk pendidikan Indonesia berkenaan dengan filsafat manusia Indonesia, rumusan manusia ideal Indonesia, sebagaimana terekspresikan dalam rumusan kompetensi-kompetensi ideal. Terdapat enam kategori kompetensi manusia ideal Indonesia. Kelimanya

terekspresikan dalam rumusan manusia (bangsa) ideal Indonesia dalam: (1) Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tentang cita-cita nasional di bidang pendidikan; (2) Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, mengenai amanat pendidikan untuk pemerintah; (3) Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang fungsi pendidikan nasional; (4) Pasal 3 dan Penjelasan atas UU RI No. 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional; (5) Pasal 1 ayat 2 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang definisi pendidikan nasional; dan (6) Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003, masih tentang definisi pendidikan nasional.

Keenam kompetensi tersebut juga terekspresikan dalam rumusan Tujuan Mata Pelajaran IPA, IPS, dan PKN SD/MI dan rumusan Standar Isinya. Keenam kompetensi tersebut: kompetensi keyakinan/ketuhanan, kompetensi kesadaran, kompetensi sebagai diri, kompetensi kognitif, kompetensi afektif, dan kompetensi psikomotor. Masing-masing kompetensi ini mengisyaratkan pedagogi yang berbeda-beda. Kompetensi kesadaran terpilih menjadi payung untuk semua kompetensi lainnya. Inilah relevansi pemikiran Freire. Alasan pertama, kesadaran Freirean memiliki beberapa dimensi yang penting: perilaku kritis, kedirian, dan praksis. Dimensi praksis dari kesadaran membuatnya mampu menjadi payung, menyediakan kejelasan tentang pengalaman belajar untuk setiap kompetensi yang ada. Karena itu pengalaman belajar untuk masing-masing kompetensi adalah: praksis (1) keimanan/ketuhanan, (2) praksis kesadaran (itu sendiri), yang berkaitan erat dengan (3) praksis kedirian, (4) praksis kognisi, (5) praksis afeksi, dan (6) praksis psikomotor.

Praksis, bukan *cogito ergo sum* (Descartes), adalah sebuah universalia kehidupan manusia dan bangsa apapun, dan apapun filsafat/ideologi/keyakinan yang dianutnya. Mereka semua meningkatkan/transformatasi (atau merusak) kehidupannya dengan praksis: aksi-refleksi.

Alasan kedua, dimensi kedirian: manusia (dan bangsa) dengan kemampuan dan watak serta peradaban yang bermartabat agar kehidupannya cerdas, karakteristik esensialnya adalah berdaulat dan berkompetensi menyeluruh/komprehensif (enam kompetensi). Berdaulat artinya memiliki diri, bersama diri-diri lain yang juga berdaulat, menentukan jalannya sejarah

(transformatif), bukan terseret tidak berdaya dalam arus sejarah karena tidak mampu membaca (menyadari) sejarah, tenggelam dalam sejarah (*submerged consciousness*). Membaca sejarah adalah kemampuan memahami hubungan sejarah dengan diri.

Indikasi ketenggelaman kesadaran secara massif adalah stagnansi perkembangan sejarah, salah satunya karena penyakit masyarakat yang massif, misalnya korupsi Indonesia.

Alasan ketiga, dimensi perilaku kritis dari kesadaran. Kritis adalah milik kompetensi kesadaran, bukan kompetensi yang lainnya. Sebuah contoh sederhana, *mengingat* adalah mengingat sebuah hal. Tetapi kemudian dapat terjadi orang menjadi *menyadari* bahwa ia telah mengingat secara keliru. Inilah metamemori, salah satu kemampuan dari kesadaran, nama lainnya metakognisi. Melalui kesadaran seseorang melampaui (*to transcend*) kompetensi-kompetensi yang ada, dan menangkap dialektika, *interrelatedness* (bukan visi *focalist* yang tumbuh karena spesialisasi).

Saat ini riset-riset metakognisi untuk pendidikan sedang marak di Barat. Riset-riset ini menemukan sejumlah mekanisme/strategi/operasi/metode dari metakognisi. (Tetapi para pendidik Indonesia jangan terbirokratisasi, melalui memorisasi, oleh metode-metode yang ada. Dalam kasus seperti ini, sesuai anjuran Freire, yang harus kita lakukan adalah me-re-kreasi metode-metode, jika bukan meng-kreasi-nya.) Ilmuwan pendidikan Indonesia sebaiknya turut melakukan riset ini, karena kesadaran atau metakognisi adalah amanat pendidikan nasional.

Pedagogi yang sudah populer di kalangan guru adalah pedagogi kognitif, dan psikomotor, untuk pedagogi afektif atau karakter baru dimulai tahun 2010. Pedagogi untuk keyakinan, kesadaran, dan diri di Indonesia dapat dikatakan belum tersedia, sekalipun ideologi bangsanya demikian adanya.

Disertasi ini menyimpulkan bahwa pedagogi yang lebih sesuai dengan filsafat bangsa Indonesia adalah praksis humanisasi religius (PHR), sekaligus PHR ini dapat mengatasi kekosongan teori pedagogi untuk pengembangan

keyakinan/keimanan, kesadaran, dan diri. Dan untuk pedagogi kognitif, PHR turut memperkuatnya, sebagaimana banyak ditemukan melalui penelitian di Barat.

## B. Implikasi

1. Pancasila adalah dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai *a way of life* bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dengan predikat-predikat yang demikian, Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka sekaligus sebagai jati diri bangsa. Pancasila harus terbuka demi pengayaan maknanya yang dibutuhkan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa dengan peradaban yang bermartabat demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa harus dijaga dan dipelihara sebagai persyaratan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa mengimplikasikan ia bersifat *fixed*, sekurang-kurangnya secara praktis sebab pengubahannya dengan jati diri yang lain akan mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lain dari dirinya sendiri. Ini akan ditolak oleh sebagian komponen bangsa Indonesia, kalau bukan oleh seluruh bangsa Indonesia. Sekalipun demikian, sekalipun bersifat *fixed*, sebuah jati diri tidak boleh statik, harus dikembangkan sambil tetap menjaga unsur-unsur dasarnya demi kesatuan bangsa. Bagaimanapun, Pancasila adalah sebuah bagian dari dunia yang kita ciptakan bersama, makhluk yang *unfinished* juga adanya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka dan sebagai jati diri bangsa harus dikembangkan, diperdalam, dan diperkaya.
2. Pemikiran filsafat dan pedagogi Freire menawari kita untuk dapat memperkaya pemikiran kita tentang Pancasila yang mencita-citakan bangsa dengan peradaban yang bermartabat demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Freire menyediakan sebuah definisi filosofis yang praktis yang dapat mengisi pemahaman kita tentang apa bangsa yang bermartabat yang mencerdaskan kehidupannya. Bangsa yang demikian selalu men-*denounce* (mengeritik keras dan terbuka) penjajahan (apapun bentuknya) harus dihapuskan dari muka bumi. Bangsa yang demikian

mengintervensi kritis dunianya, mentransformasinya agar semakin demokratis dan berkeadilan; tidak hanya me-memorisasinya dalam rangka adaptasi terhadap dunia. Adaptasi terhadap dunia adalah aspirasi mereka yang berkehendak mempertahankan *status quo* menganggap sejarah sudah berakhir. Singkatnya, bangsa yang demikian berkomitmen pada humanisasi tanpa akhir karena manusia berada antara *nothingness and being* dan *being and being better*.

3. Sebaliknya, bangsa dengan peradaban yang tidak bermatabat, menerima penjajahan atau penindasan atau dehumanisasi, menerima *status quo*, melegitimasinya. Dehumanisasi dapat dilakukan oleh siapapun dan apapun. Ketidakadilan dunia saat ini, ada bangsa dengan GNP per kapita \$20,000 dan ada bangsa-bangsa dengan GNP per kapita \$350, adalah dehumanisasi. Birokratisasi sistem pemerintahan Indonesia yang membuat sebagian orang terbirokratisasi (terpilah eksklusif secara mekanistik dalam sebuah peranan sempit *technicalities*) adalah dehumanisasi, karena membuat orang ini tidak lagi kontributif bagi organisasi dan bagi dirinya sendiri. Lukisan karikaturis orang yang demikian adalah penjaga kebersihan kantor yang super patuh pada tugasnya membersihkan ruang kantor, asyik saja dengan pekerjaannya dan tidak peduli ketika kantornya dimasuki pencuri karena menangani pencuri adalah tugas keamanan, bukan tugas kebersihan. Korupsi sebagai *toxic culture* adalah dehumanisasi, membuat manusia makan hak manusia lainnya.
4. Invasi budaya juga dehumanisasi. Hal ini dapat terjadi ketika sebuah inovasi Iptek tidak mempedulikan budaya masyarakat lokal sebagai penerima inovasi. Inovasi yang dilakukan melalui cara preskriptif, transfer teknologi, bukan komunikasi atau dialog antarbudaya atau pedagogi. Dikatakan sebagai dehumanisasi karena si penerima tidak berperan sebagai subjek, tetapi diobjektivikasi sebagai pendengar atau penerima, yang tugasnya hanya memorisasi, lalu reproduksi hasil memorisasi ini secara mekanistik. Subjek mengalami kematian *ontological vocation*-nya untuk melakukan intervensi kritis dunianya.



5. Untuk keluar dari penjajahan, penindasan, dehumanisasi, sebuah bangsa harus cerdas, berkehidupan cerdas. Solusi Freire, penuhi *ontological vocation*-nya, yaitu didiklah bangsa tersebut untuk menjadi kreator dan transformator dari dunianya, memproblematisasi dunianya, mengintervensi kritis dunianya, mentransformasi dunianya, bereksistensi atau membuat makna sendiri bersama manusia lainnya dan dunia, mentransformasi dunia, transendensi bukan tenggelam dalam dunia, *conscientization*. Kebalikannya, adalah menerima apa yang ada dan me-memorisasi apa yang ada, melegitimasi *status quo*.

6. Kurikulum interdisipliner dan lebih ramping (*less is more*)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22/2006 tentang Standar Isi Pendidikan dan Permendiknas No 23/2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan, mengantar kemunculan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006. Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah diberikan peluang mengembangkan dan menetapkan KTSP. Standar Isi tersebut, penyajiannya disiplin, dan guru-guru ketika berada di perguruan tingginya masing-masing juga memiliki banyak pengalaman belajar yang disiplin. Pendekatan yang mengutamakan Iptek dan spesialisasi biasa demikian adanya. Pendidikan transformatif lebih menghendaki kurikulum interdisipliner karena realitas bersifat kompleks sehingga penghampirannya sering menuntut pendekatan interdisipliner. Di samping itu, konteks budaya dan amanah diri juga dituntut untuk berkaitan dengan kurikulum yang interdisipliner.

Juga, pendidikan transformatif akan lebih bertumpu pada keterampilan proses sains, hingga menghendaki kurikulum yang *less is more*. Jumlah kompetensi harus berkurang, atau materi pelajarannya berkurang, agar siswa dan guru dapat meneliti secara mendalam.

7. Perkuat Otonomi Guru

Pekerjaan mengajar merupakan profesi yang diperoleh dengan mengikuti pendidikan panjang, mempunyai etika profesi dan yang terutama merupakan *calling for life* (panggilan hidup). Intervensi pengetahuan yang

terbirokratisasi sebaiknya tidak dilakukan lagi, karena guru sebagai profesi mempunyai akuntabilitas personal atas pekerjaannya. Intervensi pengetahuan yang terbirokratisasi ke dalam profesi guru menyebabkan guru terbiasa dalam pekerjaan-pekerjaan *technicalities*-mekanistik dan terperangkap pada slogan-slogan akademik tak kontekstual dan mengalami kematian diri. Otonomi atau keberdaulatan guru terjadi jika mereka mengintervensi kritis pekerjaannya dalam rangka emansipasi kehidupannya dan para siswanya.

#### 8. *Class Size* untuk Pembelajaran Kolaboratif dan Kooperatif

Kelas yang terdiri atas kurang-lebih 32 orang siswa (Permen No. 41 tahun 2007) menyebabkan interaksi pedagogis terganggu. Frekuensi interaksi antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa dalam intensionalitasnya menjadi kurang efektif karena pola interaksi yang bersifat masal. Proses pendidikan menjadi tidak *manageable* secara humanisasi.

### C. Rekomendasi

1. Pemikiran filosofis dan pedagogis Freire berisi saran yang dapat memperkaya bahkan meng-koreksi pemahaman bangsa Indonesia tentang filsafat pendidikannya. Pendidikan harus tertuju pada penciptaan peradaban yang bermartabat demi kehidupan bangsa yang cerdas. Pendidikan harus merupakan humanisasi, pemenuhan *ontological vocation* manusia sebagai pencipta dunianya, pejuang yang menentukan perjalanan sejarahnya.
2. Pendidikan persekolahan Indonesia pada tataran praktis masih didominasi oleh *banking system* yang mempersepsi momen reproduksi/konsumsi pengetahuan sebagai momen kunci. Akibatnya banyak sekolah 'beristigozah' dan yang sejenisnya ketika menjelang UN (Ujian Nasional) yang dipersepsi sebagai bagian dari momen kunci tersebut. 'Istigozah' memang perlu, tetapi jangan sampai istigozahnya diam-diam bermaksud menyerahkan tanggung jawab atas perbaikan dunia pendidikan di serahkan kepada Tuhan. Seharusnya tanggung jawab ini berada di tangan manusia.)

Teori-teori pengajaran dan pembelajaran baru yang progresif seperti konstruktivisme, *contextual teaching and learning*, *inquiry-discovery learning*, *problem solving*, *cooperative learning* sudah masuk ke dunia persekolahan Indonesia. Tetapi diduga semua teori ini dipersepsi sebagai *technicalities*, tanpa pemahaman akan *the reason for being*-nya dan konteks-konteksnya. Secara demikian, penerapannya akan mekanistik yang berdampak pada ketiadaan kreativitas dan hilangnya daya juang karena tantangan kehidupan tidak terpersepsi. Para pelaksananya bekerja dengan tidak sejalan dengan *ontological vocation* yang dimilikinya.

3. Saran yang dapat diperoleh dari Freire atas masalah proses pendidikan di atas adalah jelas, yaitu: humanisasi. Humanisasi menghendaki *technicalities*, Iptek, dikaitkan dengan konteks yang menjadi latar kehidupan manusia dan masyarakat. Humanisasi menghendaki individu tidak hanya membaca *text* (Iptek) tetapi juga *context*. Lebih lanjut lagi, hubungan-hubungan manusia dalam pendidikan harus dalam rangka humanisasi. Hubungan-hubungan tersebut dapat meliputi ukuran kelas (*class size*), kelas dengan jumlah siswa banyak dapat berarti tidak/kurang berharganya para siswa; hubungan guru-siswa, harus merupakan hubungan subjek-subjek bukan pengajar-pembelajar, hubungan siswa-buku (*official knowledge*) harus mencerminkan penghargaan kepada siswa bukan hanya kepada buku secara eksklusif hingga budaya dan jati diri siswa menjadi kerdil dihadapan buku, begitupun halnya dengan hubungan guru-buku; masih mengenai hubungan siswa-buku, siswa harus dibimbing membaca *text* juga *context*, membaca dalam rangka intervensi kritis realitas atau transformasi realitas; hubungan siswa-siswa, harus mencerminkan kesetaraan mereka tanpa diskriminasi yang bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab; hubungan manusia (guru dan siswa) dengan budaya apapun bentuknya, harus merupakan intervensi kritis budaya oleh mereka; hubungan manusia-ilmu, ilmu tidak dipersepsi sebagai kebenaran objektif tetapi kebenaran yang bergulir terus diuji melalui praksis untuk humanisasi; hubungan pendidik-pimpinan, harus

merupakan hubungan kesetaraan, subjek-subjek, bukan hubungan pemerintah dan pelaksana perintah; hubungan manusia dengan dirinya sendiri, harus merupakan pemosisian diri sebagai subjek, *a conscious body*, yang tidak hanya melakukan kognisi, tetapi juga bermetakognisi (karena itu taksonomi Bloom tidak cukup sebagai acuan untuk pembelajaran); hubungan manusia-Tuhan, manusia harus mempersepsi Tuhan sebagai sumber kekuatan untuk berjuang menentukan perjalanan sejarahnya, bukan Tuhan yang mengizinkan fatalisme manusia.

4. Perlu pengkajian lebih lanjut filsafat manusia Indonesia dan elaborasinya menjadi kompetensi-kompetensi yang menjadi tanggung jawab dunia pendidikan untuk merealisasinya.

